

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2019. Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris. Bogor, Azkiya Publishing.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia. BPS: Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi. 2021. Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka. Muaro Jambi: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. 2021. Provinsi Jambi Dalam Angka. Jambi (ID): Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi. 2021. Statistik Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi: Badan Pusat Statistik.
- BAPPEDA Provinsi Jambi. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. BAPPEDA: Provinsi Jambi.
- Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- FWI/GFW (*Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch*). 2019. Potret Keadaan Hutan Indonesia. FWI dan GFW: Bogor.
- Horota P, Riani IAP dan Marbun RM. 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.2(1).Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Cenderawasih.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2020. Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi.
- Nasrum M. 2012. Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya. Penerbit INA-Rxiv.
- Nurrochmat. 2010. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto. Makalah disampaikan Pada Rakor Mitra Utama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008: "PDRB Hijau dan Bisnis Kehutanan". Hotel Kedaton, Bandung 23 Juli 2008.
- Pawitno. 2010. Kontribusi Pendapatan Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Papua. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Universitas Negeri Papua.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (RPJMD) Tahun 2017-2022.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 2012. Peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 14 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.

- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan. Jakarta.
- Prasetyo WA, Budiani ES dan Arlita T. 2017. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Jom Faperta* Vol. 4 (1). Fakultas Pertanian. Universitas Riau.
- Pratiwi DS. 2010. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Intitut Pertanian Bogor.
- Rahmawaty. 2010. Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat. *Jurnal USU Digital Library*. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Rahmi A. 2015. Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Samsu, Suramenggala DI, Komarudin H dan Ngau Y. 2010. Dampak Desentralisasi Kehutanan Terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang (Studi Kasus Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur). Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Suhendang E. 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan Edisi Kedua. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Suparmoko M. 2010. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suseno TW. 2010. Indikator Ekonomi “Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia”. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.